

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika.

Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada

Daryanto, 2012, *Perubahan Pendidikan Dalam Masyarakat Sosial Budaya*, Bandung: PT Sarana Tutorial Nurani Sejahtera.

Fariied Ali, 2012, *Hukum Tata Pemerintahan Heteronom*, Bandung: Refika Aditama

Henra Karianga dkk, 2011, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Bandung: PT Alumni.

JJ.Von Schmid, 1998, *Pemikiran Tentang Negara Hukum*, Jakarta: Erlangga.

Josef Riwu Kaho, 2002, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

J.S. Badudu, 2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Juniarso Ridwan, 2009, *Hukum Administrasi Negara dan Kegiatan Pelayanan Publik*, Bandung : Nuansa.

Moenir, 2005, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Nomensen Sinamo, 2009, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Bumi Initama Sejahtera.

- Ridwan H.R, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sadjijono, 2008, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, Yogyakarta: Laskbang Pressindo
- SF Marbun dan Mafud MD, 1987, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Liberty.
- Sofyan Safri, 2004, *Sistem Pengawasan Manajemen*, Jakarta : PT. Pusta Quantum
- S. Prajudi Atmosudirjo, 1994, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Balai Aksara-Yudhistira.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta.
- Wahyudi Kumorotomo,2008, *Etika Administrasi Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Zainal Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Sinar Grafika

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2013

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Di Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2014.



C. INTERNET

http://id.wiki/wiki/Kartu_Tanda_Penduduk,

[www.lepank.com/2012/07/pengertian-perubahan-menurut-beberapa.html?
m=1](http://www.lepank.com/2012/07/pengertian-perubahan-menurut-beberapa.html?m=1),

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kartu_Tanda_Penduduk_elektronik

www.e-ktp.com/fungsi-e-ktp/

<https://www.google.co.id/amp/www.harianhaluan/amp/detail/66557/rekam-data-ktp-el-dukcapil-sasar-lapas-dan-sekolah>

